

Syiah dan Kerukunan?

(Tanggapan untuk Haidar Bagir)

Fahmi Salim MA

Wakil Sekjen Majelis Inteltektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI)

Artikel Haidar Bagir yang berjudul "Syiah dan Kerukunan Umat" (*Republika*, 20/1/2012) memunculkan sedikit harapan akan kerukunan kaum Ahlusunah dan Syiah di Indonesia. Apalagi, Haidar secara tegas mengimbau agar para pengikut Syiah di Indonesia tidak sekali-kali berupaya untuk melakukan dakwah Syiah di Indonesia. Menurutnya, Ayatullah Ali Taskheri, salah satu pembantu terdekat Wali Faqih Iran, pernah menyampaikan imbauan, "Hendaknyalah kaum Syiah di Indonesia meninggalkan sama sekali pikiran untuk menyiahiatkan kaum Muslim di Indonesia."

Sampai di titik itu, sikap dan imbauan Haidar Bagir—pimpinan satu penerbit yang cukup aktif menebarkan pemikiran Syiah di Indonesia—cukup mengesankan. Sayangnya, pada paparan-paparan berikutnya, Haidar justru mendistorsi riwayat-riwayat Ahlusunah dan mementahkan ajakan ukhuwah itu sendiri. Berikut ini sejumlah tanggapan terhadap paparan Haidar Bagir.

Pertama, menurut Haidar Bagir, mayoritas ulama dan kaum Syiah tidak meyakini adanya distorsi (*tahrif*) terhadap Alquran. Tapi, penjelasan Haidar itu berbeda dengan fakta. Adnan al-Bahrani, seorang tokoh Syiah kontemporer, misalnya, masih berpendapat bahwa Alquran telah mengalami distorsi dan perubahan yang dilakukan oleh orang-orang Islam (Ahlusunah). (Lihat buku *Mungkinkah Sunnah-Syiah dalam Ukhuwah?* Hlm 302).

Seorang ulama Syiah terkemuka, An-Nuri At-Thabarsi telah membahas tuntas soal *tahrif* itu dalam buku tebal berjudul, *Fashl*

al-Khitab fi Itsbatih Tahrifi Kitab Rabb al-Arbab. Di sini terhimpun lebih dari 200 riwayat yang membenarkan distorsi dalam Alquran. Bahkan, di bukunya itu Nuri at-Thabarsi mengutip 40 nama ulama Syiah Imamiyah yang meyakini doktrin *tahrif* Alquran itu. Jadi, mana yang bisa kita percaya, Haidar Bagir atau Nuri at-Thabarsi?

Selain Nuri Thabarsi, ada sederet nama-nama pemuka Syiah dari berbagai periode sejarah yang juga tegas menyatakan terjadinya *tahrif*. Setidaknya itulah hasil penelitian yang dilakukan Prof Ahmad Sa'ad al-Ghamidi (*Maktabah Syamilah* ed 2). Ia menjelaskan bahwa pernyataan adanya *tahrif* itu diungkapkan oleh lebih dari 30 ulama Syiah Imamiyah, seperti Fadhil ibn Syadzan an-Naisaburi (w 260 H) di kitab *Al-Idhah* hlm 112-114, Furat ibn Ibrahim al-Kufi (ulama abad ke-3 H) di kitab *Tafsirnya* vol 1/18, Al-'Ayasyi dalam *Tafsirnya* vol 1/12-13 dan 47-48, Abu al-Qasim Ali ibn Ahmad al-Kufi (w 352 H) dalam kitab *Al-Istighotsah min Bida' al-Tsalatsah* vol 1/51-53, dan sebagainya.

Juga, silakan merujuk kitab *Al-Kafi* (ditulis oleh Abu Ja'far al-Kulaini w 329) yang diakui sebagai kitab hadis induk yang paling sahih dengan riwayat mutawattir dan disusun pada masa *Ghaybah Shugro* dari Imam yang ke-12 yaitu Al-Mahdi, dapat kita jumpai keyakinan adanya *tahrif* dengan nada bahwa tak ada yang menggumpulkan dan menghafal Alquran persis seperti yang diwahyukan oleh Allah kecuali Ali bin Abi Thalib dan imam-imam setelahnya (vol 1/228) atau para imam yang mendapat wasiat. Jumlah ayatnya adalah 17 ribu ayat (vol 2/634) yang turut hilang dibawa Imam ke-12 Al-Mahdi dan baru akan hadir lagi saat beliau kembali dari *ghaybah*-nya.

Kedua, lebih fatal lagi, untuk mendukung pendapatnya, Haidar memperkeruh suasana dengan mendistorsi riwayat-riwayat Ahlusunah yang seolah-olah mem-

benarkan adanya *tahrif* Alquran. Ia menulis, "Ambil saja beberapa hadis dalam beberapa kitab sahih yang menyatakan hilangnya satu ayat yang hanya ada di simpanan Siti Aisyah karena dimakan kambing."

Kata-kata Haidar itu sebenarnya merupakan penghinaan terhadap Siti Aisyah ra—istri Nabi Muhammad SAW—yang memang sering dilecehkan kaum Syiah, seolah-olah beliau ceroboh dalam urusan Alquran. Sayangnya, Haidar tidak menyebut sumber apa pun. Namun, dengan mudah tulisan semacam itu kita temukan di berbagai blog di internet.

Jelas, Haidar melakukan kekeliruan dan fitnah. Memang ada tercantum dalam *Sunan Ibnu Majah*, dari Muhammad ibn Ishaq dan Abdullah ibn Abi Bakr dari 'Amrah dari 'Aisyah, dan dari Abdurrahman ibn al-Qasim dari ayahnya dari Aisyah berkata, "Telah turun ayat tentang rajam dan radha'ah (menyusui) orang dewasa dengan 10 kali susuan, sungguh dahulu tertulis di dalam lembaran di bawah tempat tidurnya dan saat Rasulullah SAW wafat kami sibuk mengurus jenazahnya sehingga masuk Dajin (hewan peliharaan seperti kambing atau ayam) dan memakan lembaran ayat itu."

Padahal, hadis itu *munkar* dan sama sekali tidak sahih, meski diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Para pakar hadis menjelaskan, ada *illat* yang merusak sanadnya, yaitu pada salah satu rawinya, Muhammad ibn Ishaq, yang dinilai *mudhtharib* (kacau hadisnya). Karena, menyelisih dan menyalahi riwayat para rawi lain yang lebih *tsiqoh* (terpercaya). Ibnu Majah sendiri ketika meriwayatkan hadis ini dari Muhammad ibn Ishaq menulik dua sanad yang berbeda dari dia.

Perawi lain yang lebih *tsiqoh* seperti Imam Malik dalam *Al-Muwattha'* (vol 2/608) dari Abdullah ibn Abi Bakr dari 'Amrah dari Aisyah, dan Imam Muslim (no1452) dari Yahya ibn Sa'id dari 'Amrah dari Aisyah, tidak menye-

but ungkapan bahwa lembaran ayat itu dimakan *Dajin* (kambing atau ayam). Oleh sebab itulah, Imam *Az-Zaila'i* menilai dalam *Tahrij Hadis dan Atsar* bahwa, penambahan redaksi *ayat rajam dan radha'ah yang ada di bawah kasur Aisyah lalu dimakan kambing* itu adalah rekayasa dan manipulasi perbuatan kaum mulhid (ateis) dan Rafidhah (Syiah).

Hal lain yang disinggung Haidar adalah adanya kutukan Bani Umayyah terhadap Ali bin Abi Thalib. Cerita ini ditulis Ibnu Sa'ad dalam kitab *Thabaqat*. Tapi, berita itu pun tidak benar dan sudah diteliti oleh Dr Ali Muhammad Shalabi dalam bukunya *Al-Khalifah al-Rasyid Umar bin Abdul Aziz*. Para pakar dan Imam Hadis Ahlusunnah menilai, Ali al-Madaini dan Luth ibn Yahya sebagai perawi yang tidak bisa dipercaya dan terbiasa meriwayatkan dari orang-orang yang lemah hafalannya dan tak dikenal (*majhul*). Dr Shalabi juga menemukan tidak adanya kitab-kitab sejarah yang ditulis semasa dengan Daulah Umayyah yang menceritakan adanya kutukan terhadap Ali RA.

Kisah itu baru ditulis di era Bani Abbasiyah dengan motif politis untuk menyeleksi-jelekkan citra Bani Umayyah di tengah umat. Dr Shalabi juga yakin bahwa kisah itu baru disusun dalam kitab *Muruj al-Dzahab* karya Al-Mas'u-di (Syi'i) dan penulis Syiah lainnya yang kemudian menyusup ke dalam kitab tarikh Ahlusunah yang ditulis belakangan, seperti Ibnul Atsir dalam *Al-Kamil fi Tarikh* yang dikutip oleh Haidar. Namun, sekali lagi, tidak ada satu pun riwayat yang sahih dalam soal ini (Shalabi: 107).

Kita tentu menyambut baik setiap upaya untuk membangun hubungan damai. Tapi, syogianya itu dilakukan dengan kejujuran dan tidak mengulang-ulang lagi tuduhan dan fitnah terhadap sahabat dan istri Nabi SAW serta mendistorsi sumber-sumber Ahlu Sunnah. *Wallahu a'lam bish-shawab*. ■

Tajuk

Keadilan Masyarakat

"Hukum Berat", begitu *headline* surat kabar yang Anda baca ini, kemarin. Hampir di semua surat kabar nasional memuat tema yang sama mengenai peristiwa kecelakaan maut yang menewaskan sembilan orang pejalan kaki pada Ahad (22/1) siang, di Jalan Ridwan Rais, Tugu Tani, Jakarta Pusat.

Pengemudi yang diketahui bernama Afriani Susanti (29) itu mengendarai mobil dalam keadaan 'mabuk' akibat mengonsumsi barang haram bersama tiga rekan-rekannya yang menumpang mobil Daihatsu Xenia. Karena kelalaiannya, sembilan orang menjadi korban. Walau diancam dengan hukuman berlapis—maksimal hukumannya diperkirakan sekitar enam tahun penjara ditambah denda sebesar Rp 12 juta,—bagi keluarga korban, pasti hukuman itu tidak setimpal dengan perbuatan pelaku yang telah menghilangkan nyawa keluarga mereka.

Bahkan, di sejumlah jejaring sosial, banyak permintaan agar hukuman yang ditimpakan kepada pelaku adalah hukuman mati, hukuman seumur hidup, ataupun 50 tahun penjara. Semuanya merasa hukuman enam tahun penjara sangat mengganggu rasa keadilan masyarakat.

Lihatlah kasus di Amerika Serikat (AS) dengan model yang sama. Pada 22 Desember 2010, Andrew Thomas Gallo (23) dari San Gabriel, California, AS, diganjar hukuman 51 tahun penjara karena mengendarai mobil dalam keadaan mabuk sehingga menewaskan sejumlah orang, di antaranya Cortney Stewart (20), mahasiswa di California State University, Nick Adenhardt (atlet bisbol), serta Henry Pearson, mahasiswa fakultas hukum, rekan Stewart.

Dalam kasus serupa, pada 7 Juni 2010, Pengadilan Houston (AS) menjatuhkan vonis 30 tahun penjara kepada John Jacob Winne karena terbukti mengendarai mobil dalam keadaan mabuk sehingga menewaskan seorang remaja berusia 13 tahun.

Tak hanya di Amerika Serikat, pengadilan di Cina juga beberapa kali meniadakan kasus serupa dengan hukuman yang sangat tinggi, yakni hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Pada Juni 2009, Pengadilan ChengDu, Cina, menjatuhkan hukuman mati kepada Sun Weiming karena mengendarai mobil dalam keadaan mabuk, kemudian terlibat kecelakaan yang menewaskan empat orang. Namun, melalui pengadilan banding, Sun Weiming akhirnya dihukum seumur hidup.

Lalu pada 8 Juni 2010, Pengadilan Zhejiang, Cina, menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Shunzhong, anggota kongres di Kota Taizhou, karena mabuk saat mengendarai mobil BMW dan menabrak belasan pejalan kaki hingga menewaskan empat orang.

Masih banyak kasus serupa yang kemudian pelakunya diancam dan dihukum dengan hukuman maksimal, yakni hukuman mati atau seumur hidup. Dalam kasus tragedi di Tugu Tani ini, bukan hanya diketahui mengonsumsi narkoba, melainkan pelakunya mengemudi kendaraan tanpa memiliki surat izin mengemudi (SIM), tidak ada surat tanda nomor kendaraan (STNK), dan menewaskan sembilan pejalan kaki.

Siapa pun akan kesal, gusar, dan marah menyaksikan si pelaku. Apalagi, seusa menabrak itu, pelaku tidak menunjukkan ekspresi menyesal atau-rasa bersalah. Sebaliknya, pelaku malah marah-marah kepada orang-orang yang ada di sekitarnya.

Karena itu, berkaca dari kasus serupa yang terjadi di negara lain, hukuman berat memang pantas diberikan kepada pelaku. Apakah hukuman maksimal itu bisa memenuhi unsur keadilan masyarakat, tentu banyak perbedaan pandangan mengenai hal ini. Yang pasti, jika bandar narkoba saja bisa divonis dengan hukuman maksimal karena satu kasus, pengemudi Xenia 'mabuk' ini tentu bisa dituntut pula dengan pasal berlapis, mulai dari pasal pembunuhan, kelalaian, melanggar larul lintas, dan mengonsumsi obat-obatan terlarang. Kita berharap aparat penegak hukum jeli dalam menetapkan hukuman yang sesuai dengan keadilan masyarakat. ■

:: suarapublika ::

Secure Parking Summarecon Mal Serpong

Tanggapan

Berkaitan dengan surat pembaca dari Ibu Hana Rufaida Heliza Putri yang dimuat di *Harian Republika* pada 17 Januari 2012 mengenai pelayanan petugas parkir di Summarecon Mal Serpong, bersama ini kami selaku pengelola dan penanggung jawab pelayanan parkir di tempat tersebut menyampaikan permohonan maaf melalui media ini secara terbuka. Sebab, kami kesulitan mendapatkan data dari Ibu Hana Rufaida Heliza Putri.

Kami sangat menyesalkan adanya sikap yang kurang terpuji dari salah seorang petugas kami. Oleh sebab itu, kami telah memberikan teguran dan sanksi kepada pelaku. Hal ini menjadi masukan yang berharga sekaligus evaluasi bagi kami untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan *secure parking* di Summarecon Mal Serpong.

Untuk itu, kami sangat menghargai dukungan para pengguna jasa *secure parking* kepada kami dengan memberikan informasi apabila terjadi hal-hal seperti yang di alami ibu. Jika ada yang ingin disampaikan, kami persilakan menghubungi *customer service hotline* dengan nomor (021) 624-6955 atau SMS *hotline* 08176-SECURE (732873). Kami menerima dengan lapang dada setiap saran dan kritik demi meningkatkan pelayanan bagi pengguna jasa *secure parking*.

Demikian surat ini kami sampaikan dan terima kasih kepada semua pihak, termasuk *Republika*, atas kerja samanya selama ini.

Niken Harsiwi

Customer Service Center PT Securindo Packatama Indonesia

Prihatin, Senayan

Jadi Tenda Perkemahan (2)

Mungkin sudah satu bulan ini aksi unjuk rasa di depan gedung DPR. Karena merasa tuntutan mereka belum diperhatikan wakil rakyat, para pendemo tetap bertahan menginap. Kondisi hujan, dingin, panas, dan angin tidak membuat mereka surut dalam melakukan aksinya. Namun, apakah kondisi cuaca yang tidak bersahabat akan membuat kondisi mereka sehat? Yang pasti akan *drop* dan mampukah terus bertahan dengan kondisi seperti sekarang.

Manusia dengan segala keterbatasan fisiknya pasti tidak akan mampu melawan alam pada saat kondisinya semakin melemah. Dengan kondisi yang melemah, apakah harus memaksakan mereka tetap bertahan? Sebenarnya yang patut disayangkan dalam kejadian seperti ini adalah kelompok yang menamakan dirinya Serikat Tani yang memfasilitasi dan bertindak sebagai koordinator aksi di lapangan. Mereka sudah datang dari jauh dengan kondisi yang sudah lelah dengan bekal seadanya. Seharusnya sebagai fasilitator dan koordinator lapangan tidak membiarkan kondisi para petani tidak seperti ini. Jika mereka sudah merencanakan menginap dengan waktu yang lama, harusnya mereka sediakan fasilitas yang memadai. Bukan seperti sekarang, pada saat kondisi fisik pendemo sudah mulai lemah dan pasrah, dukungan logistik, medis juga kurang maksimal.

Untuk menggelar aksi, mereka membarengkan dengan menyakitkan fisiknya (jahit mulut), kondisi ini membuat stamina semakin melemah. Selain mereka menyakitkan diri, tenda mereka menginap juga jauh dari layakan untuk berteduh. Di lokasi tenda tidak ada sanitasi dan sarana yang memadai sehingga secara umum menyakitkan terkesan kumuh. Mengapa hal ini harus terjadi?

Sunarto

Jl Borobudur 4 (Kav 24/4) Komp Duta Indah II Rawa Lumbu, Bekasi Selatan

Tarik Ulur Subsidi BBM

Razali Ritonga

Direktur Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan BPS RI

Dampak buruk naiknya harga BBM pada 2005 tampaknya terus membayangi pemerintah maupun wakil rakyat. Diketahui, pemerintah pada saat itu menaikkan harga BBM dua kali dalam setahun, yaitu 1 Maret 2005 dan 1 Oktober 2005.

Secara faktual, dampak buruk yang diakibatkan naiknya harga BBM saat itu adalah merosotnya daya beli masyarakat sehingga meningkatkan angka kemiskinan. Tercatat, angka kemiskinan meningkat dari 15,42 persen menjadi 17,75 persen.

Maka, atas dasar itu, menaikkan harga BBM merupakan kebijakan yang tidak populer dan harus dihindari. Fenomena ini barangkali yang diperhitungkan wakil rakyat ketika menetapkan UU APBN 2012, terutama dalam Pasal 7 ayat 4 UU APBN 2012 yang menetapkan bahwa pemerintah perlu mengatur alokasi BBM bersubsidi dan Pasal 7 ayat 6 tidak menaikkan harga BBM bersubsidi.

Subsidi BBM versus Infrastruktur

Namun, di tengah meningkatnya permintaan BBM bersubsidi, ketentuan dalam Pasal 7 ayat 6 itu kembali menjadi sorotan sejumlah pihak. Pasalnya, jika BBM tidak dinaikkan, besarnya anggaran untuk pembangunan infrastruktur layanan publik akan menurun kualitas hidup penduduk. Ada dua aspek infrastruktur layanan publik yang saat ini masih sangat kurang, yaitu infrastruktur pendidikan dan kesehatan. Kurang memadainya infrastruktur pada kedua aspek ini diperkirakan berkontribusi ter-

antikemiskinan pada 2011, yang besarnya Rp 86,1 triliun.

Bahkan, meningkatnya anggaran subsidi BBM pada gilirannya akan melemahkan kemampuan untuk pembangunan sektor-sektor lainnya, terutama infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi dan infrastruktur layanan publik. Padahal, pembangunan infrastruktur saat ini tak kalah mendesaknya untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup penduduk.

Diketahui, kurangnya infrastruktur penunjang ekonomi mengakibatkan biaya tinggi (*high cost economy*) sehingga melemahkan daya saing produk barang dan jasa. Akibatnya, harga produk menjadi mahal dan kalah bersaing dengan produk impor. Pada tahap

hadap tertinggalnya pembangunan manusia Indonesia. Laporan UNDP (2011) menyebutkan bahwa peringkat pembangunan manusia Indonesia berada di posisi 124 dari 187 negara atau mengalami penurunan dibandingkan keadaan tahun sebelumnya yang berada di peringkat 108 dari 169 negara (UNDP, 2010).

Lebih jauh, kurangnya anggaran untuk pembangunan manusia, khususnya pendidikan dan kesehatan di Tanah Air dapat diketahui dengan membandingkan dengan sejumlah negara. Malaysia, misalnya, mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 4,5 persen dan kesehatan sebesar 1,9 persen dari produk domestik bruto (PDB). Sedangkan Alokasi anggaran pendidikan kita sebesar 3,5 persen

alokasikan sebesar tiga dolar AS per kapita. Padahal, pendapatan per kapita Cina saat itu hanya sebesar 330 dolar AS, sedangkan Indonesia sebesar 440 dolar AS (UNDP, 1991).

Revisi UU APBN

Maka, atas dasar itu, pemerintah sepatutnya perlu mempertimbangkan untuk mengurangi subsidi BBM dan mengalihkan sebagian subsidi itu untuk kepentingan pembangunan infrastruktur dan sebagian lainnya untuk jaring pengaman sosial (*social safety nets*). Adapun perlunya jaring pengaman sosial terutama untuk mengantisipasi potensi meningkatnya penduduk miskin sebagai dampak kenaikan harga BBM.

Namun, pemerintah tidak bisa menetapkan kenaikan harga BBM tanpa persetujuan DPR. Maka, atas dasar itu, pemerintah perlu mengusulkan kepada DPR untuk melakukan revisi UU APBN 2012, khususnya yang berkaitan dengan Pasal 7 ayat 6 tentang penetapan harga BBM. Sepatutnya, dalam usulan itu pemerintah perlu menetapkan kenaikan harga BBM secara wajar.

Sebenarnya, jika pemerintah tidak menurunkan harga BBM pada 2008 lalu yang besarnya Rp 6.000, maka boleh jadi pemerintah saat ini tidak perlu dipusingkan untuk menaikkan harga BBM. Sementara, dana yang terhimpun dari selisih harga (*wind fall profit*) bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup penduduk.

Pemerintah sepatutnya perlu berhitung secara matang mungkin atas penggunaan anggaran belanja nasional sehingga bisa dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Tarik ulur anggaran di DPR, khususnya untuk subsidi, pasti akan terjadi, tapi seyogyanya penggunaan anggaran tetap diutamakan untuk masyarakat dan kemajuan bangsa. ■

Secara faktual, dampak buruk yang diakibatkan naiknya harga BBM saat itu adalah merosotnya daya beli masyarakat sehingga meningkatkan angka kemiskinan, dari 15,42 persen menjadi 17,75 persen.

lanjut, banyak usaha dan perusahaan dalam negeri yang akan kalah bersaing dan berpotensi mengalami kebangkrutan sehingga akan meningkatkan pengangguran dan kemiskinan. Ini sekaligus mengisyaratkan bahwa potensi meningkatkan kemiskinan juga akan terjadi baik dengan maupun tanpa kenaikan harga BBM.

Sementara itu, kurangnya anggaran untuk pembangunan infrastruktur layanan publik akan menurunkan kualitas hidup penduduk. Ada dua aspek infrastruktur layanan publik yang saat ini masih sangat kurang, yaitu infrastruktur pendidikan dan kesehatan. Kurang memadainya infrastruktur pada kedua aspek ini diperkirakan berkontribusi ter-

dan kesehatan sebesar 1,9 persen dari PDB 2010. Sekadar catatan, Norwegia sebagai negara tertinggi peringkat pembangunan manusianya di dunia mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar 6,7 persen dan kesehatan sebesar 7,9 persen dari PDB.

Bahkan, kurangnya anggaran pembangunan manusia di Tanah Air sudah terdeteksi sejak lama. Cina, misalnya, telah menetapkan prioritas pembangunan manusia lebih dahulu dari Indonesia, terdeteksi dari besarnya anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan manusia. Pada 1988, misalnya, anggaran yang dialokasikan Cina untuk pembangunan manusia sebesar tujuh dolar AS per kapita, sementara Indonesia hanya meng-

HARIAN
REPUBLIKA
MAHAKA MEDIA

Semua naskah yang dikirim ke Redaksi dan diterbitkan menjadi milik *Harian Republika*. Semua wartawan *Harian Republika* dibekali tanda pengenal dan tidak menerima maupun meminta imbalan dari siapa pun. Semua isi artikel/tulisan yang berasal dari luar, sepenuhnya tanggung jawab penulis yang bersangkutan. Semua isi artikel/opini yang terdapat di suplemen daerah, menjadi tanggung jawab Kepala Perwakilan Daerah bersangkutan.

Pemimpin Redaksi: Nashihin Masha. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Arys Hilman Nugraha.
Redaktur Pelaksana: Eiba Damhuri. **Kepala Newsroom:** M Irawan Arielyanto. **Kepala Republika Online:** Agung Pragitya Vazza.
Redaktur Senior: Anif Punto Utomo. **Wakil Redaktur Pelaksana:** Irfan Junaldi, Syahrudin El-Fiki, Kumara Dewastanta. **Asisten Redaktur Pelaksana:** Bidaranta, Joko Seding, Nur Hasan Murtiadi, Nurrobbil. **Reporter Senior:** Andi Agus Yulianto, Harun Husein, Muhammad Subarkah, Nurul S Hamami, Selamat Ginting, Teguh Setiawan. **Staff Redaksi:** Abdullah Sammy, Agus Alimiah, Ali Shahab, Asep K. Nurzaman, Andri Saubani, Anjar Fahmiarto, A Syalaby Ichsan, Bilal Ramadhan, Budi Rahajo, Burhanuddin Bella, Citra Lisyia Rini, Damanhuri Zuhri, Darmawan Sepriyosa, Darmawan, Desy Susilawati, Dewi Mardiani, Didi Purwadi, Doko Sucono, Dyah Ratna Meta Nova, Eidi Setyoko, Edwin Dwi Putranto, Eko Widayanto, Endro Yuwanto, Erdy Nasrul, Esthi Maharani, Elfi Ismail, Ferman Rahadi, Ferry Kislihandi, Firkah Fansuri, Fitri Andayani, Fitriyan Zamzami, Heri Purwata, Heri Ruslan, Ichsan Emerald Alamsyah, Indah Wulandari, Indira Rezkiarsari, Irawan Kelana, Israr, Johar Anief, Khoiril Azwar, Lillis Sri Handayani, Mansyur Faqih, Mohammad Akbar, Mohamad Amin Madani, Muhammad Fakhruddin, M As'adi, M Hafri, M Ihsan Shidiqey, Natalia Endah Hapsari, Neni Ridwanini, Nidia Zuraya, Nina Chairani Ibrahim, Palupi Annisa Auliani, Prima Resti Luffdiani, Priyantono Oemar, Rachmat Santosa Basarah, Rahmat Budi Harto, Ratna Puspita, Reiny Dwiandana, Rusdy Nurdiansyah, R Hiru Muhammad, Sefri Okfianisa, Setyanawidita Livikandasa, Sivi Tri Puji Budiwiyati, Stevy Maradona, Susie Evidia Vuidanti, Taufiqurrahman Bachdari, Teguh Firmansyah, Wachidah Handandasa, Wulan Tunjung Pulpiti, Yeyen Restiyani, Yoelbi Ganessa Rasyid, Yogi Ardhi Cahyadi, Yulianingsih, Yusuf Assidiq, Zaky Al Hamzah.
Kepala Quality Control dan Bahasa: Rakhmat Haldi Supctio. **Kepala Desain:** Sarjono. **Kepala Perwakilan Jawa Barat:** Maman Sudiaman. **Pjs Kepala Perwakilan DIY - Jateng & Jatim :** Haryadi B.Susanto. Nian Pololan (Medan), Maspril Aries (Palembang), Ahmad Baraas (Bali). **Sekretaris Redaksi:** Fachru Ratzl.

Penerbit: PT Republika Media Mandiri. **Alamat Redaksi:** Jl. Warung Buncit Raya No. 37, Jakarta 12510. **Alamat Surat:** PO Box 1006/JKS-Jakarta 12010. **Tel:** 021-780.3747 (Hunting), **Fax:** 021-780.0649 (Seluruh Bagian). **Fax Redaksi:** 021-798.3623. **E-mail:** sekretariat@republika.co.id. **Bagian Iklan:** Jl. Warung Buncit Raya No. 37, Jakarta 12510. **Tel:** 021-794.4693. **Fax:** 021-798.1169. **Sirkulasi dan Langganan:** **Tel:** 021-791.98441. **Fax:** 021-791.98442. **Online:** <http://www.republika.co.id>. **Alamat Perwakilan Bandung:** Jl. Mangga No. 37 Bandung 40114 **Tel:** 022-87243363-65. **Yogyakarta:** Jl. Perahu No. 4, Kota Baru, **Tel:** 0274-544.972, 566028. **Fax:** 0274-541.582. **Surabaya:** Jl. Barata Jaya No. 51. **Tel:** 031-501.7409. **Fax:** 031-504.5072.

Direktur Utama: Erick Thohir.
Wakil Direktur Utama: Daniel Wewengking. **Direktur Pemberitaan:** Ikhwanul Kiram Mashuri. **Direktur Operasional:** Tommy Tamtomo. **GM Keuangan:** Didik Irianto. **GM Marketing dan Sales:** Yulianingsih. **Manajer Iklan:** Indra Wisnu Wardhana. **Manajer Produksi:** Nurrokhim. **Manajer Sirkulasi:** Darikman Ruminta. **Manajer Keuangan:** Hery Setiawan.

Harga Langganan: Rp. 69.000 per bulan, harga eceran Pulau Jawa Rp 2.900. **Harga Eceran Luar Jawa:** Rp. 4.000 per eksemplar (tambah ongkos kirim). **Rekening Bank a.n PT Republika Media Mandiri:** Bank BSM, Cab. Warung Buncit, No. Rek. 0030113448 (Bank Mandiri, Cab. Warung Buncit, No. Rek. 1270004240642 (Bank Lippo, Cab. Warung Buncit, No. Rek. 72730.028988 (Bank BCA, Cab. Graha Inti Fauzi, No. Rek. 375.305.666.8. **Diyur Izin Usaha Penerbitan Pers:** SK Menpen No. 283/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1992. **Anggota Serikat Penerbit Surat Kabar:** Anggota SPS No. 163/1993/11/A/2002.